

Sejarah dan Perbandingan Pendidikan Multikultural Di Negara Turki dan Belanda

Suprapno
STAI Ma'arif Sarolangun
suprapno91@yahoo.co.id
Ahmad Hifdzil Haq
hifdzilhaq@gmail.com
STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan
Hery Noer Aly
hery.noer.aly@gmail.com
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Zulkarnain
zulkarnain@yahoo.co.id
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Ismail
ismailmunir1972@gmail.com
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstract

The purpose of this study is to reveal and describe the history and development as well as a comparison of the application of the ideology of multiculturalism in every policy of the Turkish and Dutch governments. Especially about the history and comparison of multicultural education systems in Turkey and the Netherlands. The research method used is a historical-based qualitative method, considering that the data to be studied is an event that has occurred. This historical research approach is carried out by reviewing library data (library research). The analytical technique used in this research is descriptive qualitative analysis by discussing the data from primary sources readings with secondary sources reading data. The results show that these two countries both apply the ideology of multiculturalism and the application of multicultural education, this is done because these two countries are places for immigrants who have different backgrounds for escape, however, in the application of the multicultural education system of these two countries in its application, differences were found, this was caused by differences in the majority of religions in Turkey and the Netherlands. Differences in the application of a multicultural education system include the freedom of parents in choosing and extraordinary in determining state and private schools of their respective denominations in Turkey and the Netherlands, the important and very central role of the Turkish government is clearly visible in conceptualizing, implementing, and evaluating a curriculum that includes the value of multiculturalism and textbooks, compared to the multiculturalism policy in the Netherlands looks marginal and only makes adjustments and examinations of teaching materials that contain the ideology of multiculturalism.

Keywords: Between Turkish multiculturalism and Dutch multiculturalism.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan mendiskripsikan tentang sejarah dan perkembangan serta perbandingan penerapan ideologi multikulturalisme dalam setiap kebijakan pemerintah Turki dan Belanda. Terutama tentang sejarah dan perbandingan sistem pendidikan multikultural di Turki dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis *historis*, mengingat data yang akan diteliti merupakan kejadian yang telah terjadi. Pendekatan penelitian *historis* ini dilakukan dengan cara menelaah data kepustakaan (*library reseach*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mendiskusikan data hasil bacaan sumber primer dengan data hasil bacaan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua negara ini sama-sama menerapkan ideologi multikulturalisme dan penerapan pendidikan multikultural, hal tersebut dilakukan karena kedua negara ini menjadi tempat pelarian para imigran yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun demikian dalam pengaplikasian sistem pendidikan multikultural kedua negara ini dalam penerapannya ditemukan adanya perbedaan, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan mayoritas agama yang ada di Turki dan Belanda. Perbedaan dalam penerapan sistem pendidikan multikultural meliputi kebebasan orang tua dalam memilih dan luar biasa dalam menentukan sekolah negeri maupun sekolah denominasi masing-masing di Turki dan Belanda, peran penting dan sangat sentral dari pemerintah Turki nampak jelas dalam mengkonsep, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang memuat nilai multikulturalisme dan buku-buku teks, dibandingkan dengan kebijakan multikulturalisme yang ada di Belanda terlihat marjinal dan hanya melakukan penyesuaian dan pemeriksaan bahan ajar yang memuat ideologi multikulturalisme.

Kata Kunci: multikulturalisme Turki dan multikulturalisme Belanda

Pendahuluan

Perspektif sejarah multikulturalisme terimplementasi secara luas ke berbagai negara sejak tahun 1970-an, negara yang pertama kali memproklamkan ialah Kanada, yaitu sejak 1971, selanjutnya negara Australia tahun 1973 dengan menjadikan ideologi multikulturalisme sebagai kebijakan untuk bangsa sebagai upaya bentuk pengelolaan keanekaragaman budaya, etnis, bahasa dan keyakinan dalam beragama yang ada di berbagai wilayah negara Australia. Atas dasar fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa terminologi multikulturalisme merupakan konsep atau gagasan dalam membentuk kesadaran bersama atau kesadaran kolektif yang dituangkan dalam bentuk kebijakan negara. Berbagai konsekuensi, baik secara sosial maupun secara kultural, terutama sekali konsekuensi yang tidak dikehendaki sebagai implikasi dari melonjaknya gelombang kelompok migrasi yang berskala besar sejak tahun 1960-an dan akhir tahun 1970-an.¹

Sejak diproklamirkannya kebijakan ideologi multikulturalisme oleh pemerintah Kanada pada 1995, implementasi ideologi multikulturalisme secara formal oleh negara tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai akademisi dan para politikus yang ikut serta menggagas dan menginternalisasikan dalam bentuk perencanaan kebijakan serta ikut membantu mempromosikannya. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan multikulturalisme ini menjadi sebuah keharusan dalam aspek politik yang bersifat progresif dan bentuk ekspresi yang resmi atas keyakinan terhadap keunggulan nilai kesamaan hak, kesetaraan, toleransi, demokratis dan sikap inklusif terhadap sesama termasuk juga terhadap para kaum imigran yang datang dari berbagai negara yang berbeda latar belakang budaya, etnis bahasa, dan keyakinan dalam beragama. Berikut adalah salah satu pernyataan dari salah satu pejabat pemerintah Kanada terkait dengan pentingnya penerapan kebijakan ideologi multikulturalisme yang diberlakukan di Kanada merupakan sesuatu yang fundamental bagi kepercayaan kita bahwa setiap warga negara adalah sama (*equal*). Multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk tetap mempertahankan identitas mereka, berbangga atas leluhur mereka, dan mempunyai rasa kepemilikan yang mendalam (*a sense of belonging*).²

Sementara itu, di Australia secara terang-terangan memproklamkan diri atas implementasi kebijakan ideologi multikulturalisme dan bahkan mewajibkan kepada setiap anak bangsa untuk mempelajari ideologi multikulturalisme sejak tahun 1970-an. Hal tersebut sebagai bentuk tanggapan atau respons terhadap meningkatnya jumlah pendatang dari Asia yang mendaftar untuk bermukim di negara ini. Kehadiran para imigran atau pendatang dari luar Australia tidak bisa dikategorikan dalam tipe masyarakat atau kaum

¹ "Multikulturalisme Indonesia dan Eropa | Republika Online," diakses 7 Juni 2022, <https://www.republika.co.id/berita/n44s11/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa>.

² "Konsep pendidikan multi kultural dalam kerangka pendidikan islam," diakses 8 Juni 2022, <https://123dok.com/document/7q0em0xy-konsep-pendidikan-multi-kultural-dalam-kerangka-pendidikan-islam.html>.

tertentu. Kasus yang sama juga terjadi di negara-negara lain, seperti negara Kanada, negara USA, negara Israel, negara Inggris, dan negara Jerman, namun demikian implementasi kebijakan ideologi multikulturalisme di berbagai negara tersebut secara prinsip berbeda-beda.³

Perspektif historis multikulturalisme di berbagai Negara menjadi kebijakan formal, terutama di Negara Barat dan Eropa seperti Inggris, Afrika, Prancis, Amerika sejak tahun 90 an. Selanjutnya kebijakan tersebut diadopsi oleh sebagian anggota Negara Uni Eropa, sejak itulah kemudian sejumlah negara-negara di benua Eropa, terutama Inggris dan Perancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme.⁴ Perubahan peraturan atau kebijakan ini mulai menjadi landasan atau subyek saling adu argumen di Negara Jerman dan Negara Britania Raya, dan bahkan ke berbagai negara lainnya.⁵

Multikulturalisme memiliki berbagai macam pemaknaan dan pengertian serta kecenderungan pandangan tentang perkembangan secara konsep dan secara praktek multikulturalisme yang seringkali dikemukakan oleh para akademisi dan para peneliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam Muh Idris bahwa multikulturalisme dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian; 1) multikulturalisme isolasionis; 2) multikulturalisme akomodatif; 3) multikulturalisme otonomis; 4) Multikulturalisme kritikal atau interaktif; dan 5) multikulturalisme kosmopolitan.⁶

Azra dalam Lasijan mengemukakan bahwa multikulturalisme merupakan gagasan dunia yang selanjutnya diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan secara formal dalam bentuk pelestarian berbagai kebudayaan sebuah bangsa dengan memberikan penekanan tentang upaya penerimaan terhadap realitas keragaman etnis, budaya, ras, bahasa, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama dalam kehidupan masyarakat.⁷ Multikulturalisme marak diaplikasikan pada tahun 1950 an di Kanada. Menurut *longer oxford dictionary* dalam Zainullah dikemukakan bahwa multikulturalisme secara istilah adalah deviasi kata multicultural yang secara spesifik menggambarkan bangsa dan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multicultural dan multilingual.⁸

³ "Multiculturalism and Ethnic Identity in Britain and Europe," Universitas Indonesia Library (Jurnal Kajian Wilayah Eropa Vol. 3 No. 3 2007: 52-67, 2007), <https://lib.ui.ac.id>.

⁴ Gülay Aslan, "Teachers and multiculturalism in turkey: An evaluation of the competency perceptions of teachers regarding multiculturalism and their reflection of these perceptions to the classroom," *Journal for Critical Education Policy Studies* 15 (1 Desember 2017): 361–96.

⁵ John A. Hall, "Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, and: Multinational Democracies (review)," *The Canadian Journal of Sociology* 29, no. 3 (2004): 482–83, <https://doi.org/10.1353/cjs.2004.0041>.

⁶ Muh Idris, "AZYUMARDI AZRA'S THOUGHT ON MULTICULTURAL EDUCATION," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 1 (26 Oktober 2020): 52–70, <https://doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739>.

⁷ Lasijan Lasijan, "MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 125–39, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1610>.

⁸ Zainullah Zainullah dan Ach Sayyi, "Dinamika Pendidikan Islam Multikultural Perspektif Tradisi Dan Perkembangan Pesantren Di Indonesia," *FIKROTUNA* 9, no. 1 (13 Agustus 2019): 1137–59, <https://doi.org/10.32806/jf.v9i2.3489>.

Dinamika pendidikan multikultural di belahan dunia selalu hangat untuk kita perbincangkan dalam lintas akademisi, hal ini dikarenakan memiliki implikasi terhadap pola hidup masyarakat multikultural di kancah dunia. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan multikultural di sebuah Negara akan menjadi tolak ukur kemajuan, keharmunisan, kerukunan dan kedamaian antar sesama anak bangsa dalam sebuah Negara. Selain hal tersebut dinamika pendidikan multikultural menjadi motor penggerak dalam sebuah Negara untuk menegakkan humanisme, pluralisme, moderatisme dan demokrasi yang terimplementasi melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal mulai tingkat dasar hingga tingkat perguruan Tinggi.⁹

Pendidikan multikultural perspektif historis secara sederhana merupakan pengakuan dan pengajaran terhadap anak bangsa atas keragaman dan pluralisme budaya. Menurut Tilaar Pluralisme budaya bukan *given*, melainkan sesuatu yang mengandung proses transformasi nilai-nilai luhur dalam suatu kelompok. Bank dalam Rustam Ibrahim memberikan penjelasan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah penjelasan dan kepercayaan yang menilai dan mengakui urgensi keanekaragaman dan kemajmukan budaya dan etnis dalam model gaya hidup, identitas pribadi, pengalaman sosial, dan kesempatan pendidikan masing-masing individu, kelompok dan bahkan Negara.¹⁰

Menelaah konteks historis kedua negara, maka akan didapatkan sisi perbedaan budaya, karakter masyarakat dan agama yang dianut mayoritas masyarakatnya. Perbedaan ini tentu akan berimplikasi pada kebijakan serat penerapan pendidikan multikultural yang dijadikan pedoman untuk pengembangan pendidikan multikultural.

Artikel ini, penulis hendak mengungkap dinamika perbandingan dan perkembangan pendidikan multikultural di Negara Turki dan Belanda. Secara konsep dan ideologi kenegaraan 2 Negara ini sangat berbeda, namun demikian dalam hal dinamika penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan di dua Negara ini menjadi penting untuk kita pelajari dan kita ketengahkan dalam kancah akademisi, guna menambah wawasan lebih luas dalam rangka mengajarkan nilai pendidikan multikultural di Indonesia, baik dalam bentuk pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan, ataupun melalui kebijakan pemerintah pusat dan bahkan kebijakan pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten maupun kota.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam menggali data-data terkait dinamika perkembangan dan perbandingan pendidikan multikultural di Negara Turki dan Belanda adalah metode kualitatif berbasis *historis*, mengingat data yang akan diteliti merupakan

⁹ "Sejarah Perkembangan Multikultural di AS dan Eropa," diakses 7 Juni 2022, <https://text-id.123dok.com/document/dzx3pr3nz-sejarah-perkembangan-multikultural-di-as-dan-eropa.html>.

¹⁰ Rustam Ibrahim, "PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam," *ADDIN* 7, no. 1 (14 November 2015), <https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>.

kejadian yang telah terjadi. Pendekatan penelitian *historis* ini dilakukan dengan cara menelaah data kepustakaan (*library reseach*). Maka dari itu dibutuhkan data primer dan sekunder dari teks buku, jurnal, dan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan dinamika perbandingan dan perkembangan pendidikan multikultural. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif¹¹ dengan mendiskusikan data hasil bacaan sumber primer dengan data hasil bacaan buku sekunder.

Pendidikan Multikultural di Turki Perspektif Historis

Multikulturalisme di Turki

Perspektif historis, multikulturalisme adalah salah satu konsep yang paling populer dalam literatur akademis yang relevan dan di ranah politik dalam seperempat abad terakhir. Sebagai sebuah gagasan yang sebagian merupakan produk dari proses globalisasi, multikulturalisme menarik perhatian yang intens sejak awal tahun 90-an, menyebabkan perdebatan terus-menerus dengan landasan teoretis dan filosofisnya dan membuat dampak penting pada pembentukan internal negara-negara yang berbeda.¹² Turki termasuk di antara Negara-negara yang sangat dipengaruhi oleh diskusi-diskusi di atas. Memang, geografi Turki yang sangat heterogen dalam hal etnisitas dan budaya, dan minatnya yang lama pada isu-isu agama dan minoritas nasional, menunjukkan negara ini sebagai model yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks multikulturalisme.¹³

Kajian historis tentang multikulturalisme di Turki adalah untuk pembuktian terkait implementasi kebijakan pendidikan multikultural dan membuat gambaran umum tentang perjalanan panjang Turki dan menunjukkan statusnya saat ini di tengah urgensi multikulturalisme. dalam kehidupan masyarakat yang majmuk seperti Negara Turki ini, penekanannya adalah adanya kebijakan minoritas Kesultanan Utsmaniyah pada masa klasiknya dan kemudian perubahannya dalam perjalanan waktu. Kemudian dilanjutkan dengan adanya prinsip-prinsip dasar ideology pendiri Republik Turki terhadap kelompok minoritas dan proses transformasi paradigma di era multikulturalisme.

Seperti yang diperdebatkan secara luas, abad kesembilan belas adalah "zaman nasionalisme" yang tepat karena hampir seluruh abad menyaksikan upaya minoritas untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara-bangsa mereka sendiri.¹⁴ Bahkan Perang Dunia I sendiri akan pecah sebagian sebagai akibat dari masalah minoritas dan setelah

¹¹ Ach Sayyi Ach Sayyi dkk., "Management Model of Kitab Kuning Reading Acceleration Program at Mambaul Ulum Islamic Boarding School, Bira Timur Sampang," *FIKROTUNA* 13, no. 01 (8 Oktober 2021), <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/4788>.

¹² Kadir Karatekin, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, dan Muhammet Hayati Taban, "A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students: Austria, Hungary and Turkey Sample," *Journal of History Culture and Art Research* 8, no. 4 (22 Desember 2019): 36–55, <https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2238>.

¹³ "Multiculturalism in Turkey," diakses 2 Juli 2022, <https://www.cambridge.org/core/books/multiculturalism-in-turkey/6EA9042377160BA61BA7E0ED165259F8>.

¹⁴ Peter Karacsony dkk., "The Impact of the Multicultural Education on Students' Attitudes in Business Higher Education Institutions," *Education Sciences* 12, no. 3 (Maret 2022): 173, <https://doi.org/10.3390/educsci12030173>.

perang, beberapa upaya penting dilakukan dalam upaya untuk melindungi budaya minoritas dan mengatur potensi konflik yang mungkin timbul dari pertanyaan minoritas.¹⁵ Isu-isu ini pertama-tama ditangani mengenai hak-hak sesama warga negara di negara lain seperti yang terlihat dalam contoh Jerman-Polandia. Solusi dari permasalahan yang ada sebelumnya dicari dalam perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut, maka sistem perjanjian ini adalah diperluas dan diberi karakter multilateral di bawah Liga Bangsa-Bangsa.¹⁶ Dalam pengertian ini, ada kepentingan yang meluas dalam pertanyaan-pertanyaan minoritas dan masalah-masalah ini memiliki tempat yang penting dalam hubungan antarnegara selama periode antarperang, seperti abad kesembilan belas.

Namun, setelah Perang Dunia II, perhatian umum terhadap hak-hak minoritas ini sebagian besar menghilang karena dua alasan utama. Pertama, perjanjian internasional yang dirancang untuk mempromosikan hak-hak minoritas jelas gagal menetralkan konflik antaretnis, dan kedua, konfrontasi ideologis keras yang meletus setelah perang kini membayangi masalah etnis. Oleh karena itu, pada periode pascaperang tidak ada proyek khusus untuk hak-hak kelompok minoritas yang telah dikembangkan dan pertanyaan tentang hak-hak minoritas dicoba untuk diselesaikan di bawah payung hak asasi manusia secara umum.¹⁷ Diharapkan masalah minoritas akan diselesaikan melalui perbaikan demokrasi (di sini dipahami secara umum sebagai kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki properti, hak untuk memilih dan mencalonkan diri, dll.) dan prestasi kesejahteraan ekonomi di masyarakat.¹⁸ Menurut cara pemahaman ini, jika hak asasi manusia dilaksanakan dengan cara yang tepat, tidak perlu ada hak-hak berbasis nasional atau etnis yang terpisah. Mentalitas ini juga merupakan inti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam dokumen tersebut, prinsip nondiskriminasi dan kewarganegaraan yang setara telah diterima sebagai dasar dari semua hak ini.¹⁹

Namun demikian, selama berabad-abad di mana minoritas diharapkan untuk berasimilasi ke dalam kelompok mayoritas dengan imbalan persamaan hak, terlihat bahwa masyarakat minoritas pada umumnya menolak menyerahkan identitas etnis mereka dan semua tindakan untuk mencapai tujuan itu hanya memperburuk situasi. Memang, hanya ada

¹⁵“(2) Multicultural Education Curriculum Development in Turkey | Hasan Aydin - Academia.edu,” diakses 2 Juli 2022,

https://www.academia.edu/22480593/Multicultural_Education_Curriculum_Development_in_Turkey.

¹⁶ Seçkin Özsoy dan Sabiha Bilgi, “Multicultural Education Perspective in Turkey: Possibilities and Dilemmas,” dalam *Learning from Difference: Comparative Accounts of Multicultural Education*, ed. oleh Joseph Lo Bianco dan Aydin Bal, Multilingual Education (Cham: Springer International Publishing, 2016), 147–69, https://doi.org/10.1007/978-3-319-26880-4_8.

¹⁷ “Multiculturalism in Turkey.”

¹⁸ Leyla Neyzi, review of *Review of Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State*, oleh Durukan Kuzu, *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 7, no. 2 (2020): 273–75.

¹⁹ Serkan Aslan*, “How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study,” *How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study* 8, no. 1 (2 Mei 2019): 233–47.

beberapa contoh di antara minoritas nasional yang secara sukarela berasimilasi ke dalam negara mayoritas.²⁰ Identitas nasional dan nasionalisme minoritas yang dianggap menurun, sebaliknya mendapatkan momentum setelah berakhirnya Perang Dingin dan perjuangan untuk pengakuan etnokultural menjadi sumber kekerasan politik yang paling umum di seluruh dunia. Dan proses ini mau tidak mau memicu kritik terhadap rezim hak asasi manusia pascaperang dan paradigma negara-bangsa, dan di sisi lain, memunculkan cara berpikir multikulturalis. Artinya, teori hak asasi manusia tradisional dianggap didukung oleh teori hak minoritas dan keyakinan ini akan mengarah pada perkembangan multikulturalisme. Kecenderungan ini akan terungkap dalam berbagai konvensi internasional yang ditandatangani pada tahun 90-an seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Menjadi Milik Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik pada tahun 1992, Komisi Keamanan dan Kerjasama di Eropa “Dokumen Pertemuan Kopenhagen Konferensi tentang Dimensi Manusia CSCE” pada tahun 1990 dan “Piagam Eropa untuk Bahasa Regional atau Minoritas” Dewan Eropa pada tahun 1992 dan “Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas” pada tahun 1995.

Di era baru, pergeseran mendasar pada kewajiban yang diberikan kepada negara mengenai isu-isu minoritas adalah transisi dari sekadar nondiskriminasi ke perlindungan aktif terhadap keragaman dengan tujuan membuat pluralisme budaya benar-benar mungkin terjadi. Dengan demikian, sekarang negara seharusnya tidak hanya melakukan tugas negatif seperti memberikan hak sipil yang sama kepada semua warga negaranya, tetapi juga mengemban tugas positif untuk mengamankan perwakilan politik, pekerjaan yang adil, dan peningkatan budaya kelompok yang tidak menguntungkan. Untuk alasan ini, multikulturalisme harus dianggap sebagai pendekatan yang mencadangkan tujuan kewarganegaraan yang sama, tetapi secara bersamaan bermaksud untuk mencapai tujuan ini tanpa membuat kelompok-kelompok yang berbeda menjadi homogen secara budaya.

Namun, setelah Perang Dunia II, perhatian umum terhadap hak-hak minoritas ini sebagian besar menghilang karena dua alasan utama. Pertama, perjanjian internasional yang dirancang untuk mempromosikan hak-hak minoritas jelas gagal menetralkan konflik antaretnis, dan kedua, konfrontasi ideologis keras yang meletus setelah perang kini membayangi masalah etnis. Oleh karena itu, pada periode pascaperang tidak ada proyek khusus untuk hak-hak kelompok minoritas yang telah dikembangkan dan pertanyaan tentang hak-hak minoritas dicoba untuk diselesaikan di bawah payung hak asasi manusia secara umum. Diharapkan masalah minoritas akan diselesaikan melalui perbaikan demokrasi (di sini dipahami secara umum sebagai kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk memiliki properti, hak untuk memilih dan mencalonkan diri, dll.) dan prestasi kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Menurut cara pemahaman ini, jika hak asasi manusia

²⁰ Hall, “Politics in the Vernacular.”

dilaksanakan dengan cara yang tepat, tidak perlu ada hak-hak berbasis nasional atau etnis yang terpisah. Mentalitas ini juga merupakan inti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamarikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam dokumen tersebut, prinsip nondiskriminasi dan kewarganegaraan yang setara telah diterima sebagai dasar dari semua hak ini.² Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa persatuan orang dapat dipastikan tanpa keseragaman di antara mereka dan secara alami mengharuskan negara untuk mengambil alih kewajiban tertentu untuk melindungi perbedaan budaya.

Dinamika Pendidikan Multikultural di Turki

Fenomena perspektif sejarah dapat dijabarkan bahwa bangsa Turki hampir semua masyarakat memiliki budaya, ras, etnis, bahasa, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut penting kiranya untuk terus dilestarikan melalui penerapan pendidikan multikultural dan urgen untuk terus di eksplorasikan di lembaga pendidikan melalui implementasi kurikulum atas dasar kebijakan pemerintah Turki.²¹ Hal ini mengacu pada negara-negara modern, lembaga pendidikan menjadi bagian penting untuk mensosialisasikan multikulturalisme sebagai upaya mencegah terjadinya konflik antara sesama anak bangsa, dan bahkan semua lembaga pendidikan menjadi urgen untuk dipersiapkan secara totalitas dalam memfasilitasi pembelajaran multikultural melalui komponen-komponen yang diperlukan dari pendidikan institusional guru, administrator, dan konten kursus yang relevan untuk mengatasi struktur masyarakat yang kompleks di negara-negara modern tersebut.²² Ketika lembaga pendidikan dan semua komponennya dipersiapkan, peserta didik akan dapat terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam di mana mereka tinggal.²³

Bahkan ketika suatu masyarakat tidak tinggal di daerah yang beragam atau multikultural, maka para generasi anak bangsa di Turki itu harus tetap ditanamkan nilai multikulturalisme melalui lembaga pendidikan, sehingga mereka memiliki bekal hidup dan cara pandang yang inklusif dengan mengedepankan asas kebersamaan dan agar mereka memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih beragam dan menjadi warga dunia. Belajar tentang budaya yang berbeda, gaya hidup, etnis dan semua bentuk keragaman lainnya memungkinkan siswa memiliki pandangan yang lebih

²¹ Amandine Barb, "The New Politics of Religious Education in the United States and Germany," *German Law Journal* 20, no. 7 (Oktober 2019): 1035–46, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.73>.

²² Serkan Aslan* dan Birsel Aybek, "Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill," *Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill* 6, no. 1 (18 Februari 2020): 43–55.

²³ Neyzi, "Review of Multiculturalism in Turkey."

komprehensif tentang dunia daripada yang mereka miliki sebelumnya dan cara pandang yang lebih baik (inklusif) untuk bergaul dengan orang lain.²⁴

Namun demikian, populasi Negara Turki berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara tersebut terdiri dari kelompok etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama beragam dan telah mengalami peningkatan yang pesat selama bertahun-tahun, dan integrasi mengenai latar belakang kelompok etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama ke dalam kurikulum telah menjadi isu yang semakin penting bagi sistem pendidikan Turki untuk terus dikaji dan disandingkan dengan kebijakan pemerintah Turki.²⁵ Pertumbuhan dan perkembangan secara meningkat dari kelompok etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama di Turki ini, memaksa keseluruhan anak bangsa Turki untuk diberikan penanaman tentang pentingnya nilai kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan guru masa depan untuk mengajar isu-isu mengenai keragaman dalam pengaturan kelas yang beragam dan pengajaran multikulturalisme melalui program pendidikan guru.²⁶

Kajian tentang dinamika pendidikan multikultural di Negara Turki diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural menjadi isu yang penting untuk diketengahkan, mengingat Negara tersebut merupakan negara yang baru saja menganut sistem pemerintahan yang skuler dan dihuni oleh bangsa yang mengalami peningkatan beragamnya etnis, budaya, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama. Jika pemerintah Turki tidak saja mengeluarkan kebijakan dalam bentuk kurikulum tentang penerapan pendidikan multikultural dengan menanamkan pentingnya nilai kesadaran dalam hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda secara etnis, budaya, ras, paham keagamaan, dan bahkan keyakinan dalam beragama, maka sudah dapat dipastikan bahwa Negara tersebut akan mengalami perpecahan yang memicu terjadinya konflik secara terus-menerus ditengah-tengah masyarakat sesama anak bangsa.

Pendidikan Multikultural di Belanda Perspektif Historis

Dinamika Multikulturalisme di Belanda

Perspektif historis, Belanda, seperti sebagian besar Eropa, berada di tengah-tengah perdebatan politik tentang kohesi sosial. Konsep inti dalam debat ini adalah keragaman dan kesamaan. Sejak tahun enam puluhan penduduk Belanda menjadi beragam secara etnis sebagai akibat dari proses migrasi. Para imigran membawa bahasa, budaya, dan agama yang berbeda. Isu kohesi sosial muncul tanpa adanya kita yang menyatukan. Dikotomi

²⁴ Eshabil Erdem Paksoy dan Sabri Aşelâk, "Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education," *Educational Research and Reviews* 14, no. 8 (23 April 2019): 274–81, <https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171>.

²⁵ Erdem Eshabil dan ÇELİK Sabri, "Readiness of Turkish Education system for Multicultural education," *Educational Research and Reviews* 14 (23 April 2019): 274–81, <https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171>.

²⁶ Aslan, "Teachers and multiculturalism in turkey."

dominan yang dikonstruksi dalam konteks proses othering adalah dikotomi non-imigran/imigran, bahkan imigran Barat/non-imigran Barat. Sejak peristiwa 9/11, dikotomi agama Kristen/Muslim semakin banyak digunakan dan disertai dengan ketimpangan akses perumahan, pekerjaan dan pendidikan.²⁷ Kewarganegaraan adalah isu sosial-politik baru. Intinya tentang keseimbangan antara keragaman dan kesamaan, tentang batasan untuk mengakui dan mendukung identitas budaya dan agama yang beragam dan kemungkinan membangun 'kita' pemersatu baru, dan tentang dilema dalam menanggapi tujuan sosial distributive budaya dan keadilan.²⁸

Pada abad ke 20, Belanda menjadi tempat persinggahan para imigran dari berbagai Negara, terutama negara-negara yang ada di Benua Eropa. Bangsa Belanda dalam komunikasi sosial keseharian menggunakan bahasa Belanda dengan baik, meskipun sebagian hasil penelitian menyebutkan bahwa Negara Belanda tergolong tidak monolingual.²⁹ Dengan demikian bangsa Belanda diyakini memiliki nilai budaya berbasis kerifan lokal yang terintegrasi dengan budaya Nasional. Tidak hanya itu, Belanda juga memproklamkan tentang kesadaran individu terhadap identitas yang sama, memiliki pahlawan kebangsaan yang sama, dan termasuk didalamnya mempercayai adanya mitos-mitos yang sama. Negara Belanda pada tahun 1960-an secara terus-menerus kedatangan tenaga kerja asing/imigran, hal tersebut berkembang pesat sampai pada tahun 1970, puncaknya setelah kedatangan para imigran/pekerja asing dari negara Turki dan negara Maroko.³⁰

Atas dasar fenomena inilah kemudian negara Belanda menjadikan multikulturalisme sebagai konsensus ideologi kebangsaan negara Belanda antara kelas politik pemerintahan. Prinsip multikulturalisme terintegrasi dengan kebijakan pemerintah Belanda selogan atau kalimat *Integratie met behoud van eigen taal en cultuur*.³¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara Belanda telah melaksanakan integrasi sosial, akan tetapi para imigran/pekerja tetap diperkenankan untuk menggunakan bahasa dan melestarikan budaya mereka masing-masing.³² Terlihat jelas bahwa negara Belanda ini melakukan integrasi atau kombinasi antara kesadaran nasionalisme dengan kesadaran terhadap pengakuan pluralisme etnis dan budaya dengan berlandaskan pada asal mula

²⁷ F. M. B. L. Linthorst, "The Role of Race and Culture within Marginalized Teachers' Teaching in The Netherlands," 2020, <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38622>.

²⁸ Mark Deuze, "Multicultural Journalism Education in the Netherlands: A Case Study," *Journalism & Mass Communication Educator* 60 (1 Desember 2005), <https://doi.org/10.1177/107769580506000407>.

²⁹ Elina Airrián, *The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands: A Post-Structural Policy Analysis* (Malmö universitet/Kultur och samhälle, 2019), <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-22754>.

³⁰ Peter Scholten, "The Dutch Multicultural Myth," dalam *Challenging Multiculturalism*, ed. oleh Raymond Taras, European Models of Diversity (Edinburgh University Press, 2013), 97–119, <https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt20q22fw.11>.

³¹ Ayhan Kaya, "The Netherlands: From Multiculturalism to Assimilation," dalam *Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization*, ed. oleh Ayhan Kaya, Migration, Diasporas and Citizenship (London: Palgrave Macmillan UK, 2009), 116–40, https://doi.org/10.1057/9780230234567_5.

³² Scholten, "The Dutch Multicultural Myth."

kesepakatan terbentuknya komunitas.³³ Model pengintegrasian sebagaimana di atas, dapat ditafsirkan sebagian bagian kekhasan atau karakteristik integrasi negara Belanda.

Perspektif kajian di atas, dapat dijabarkan bahwa multikulturalisme di Belanda adalah kelanjutan dari budaya dan tradisi yang telah berjalan di Belanda yang oleh sebagian para peneliti di atas, disebutkan sebagai penerapan prinsip pluralisme agama dan budaya.³⁴ Masing-masing kelompok agama diberikan hak agar dapat mengembangkan institusinya masing-masing.³⁵ Pada Tahun 1980-an negara Belanda memberlakukan politik etnis minoritas, dengan tujuan agar kaum pendatang atau imigran diizinkan untuk melestarikan tradisi mereka dan memelihara identitas mereka.³⁶ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kebijakan pemerintah dalam implementasi kurikulum pembelajaran dengan mengajarkan bahasa imigran di lembaga pendidikan milik pemerintah, dan bahkan pemerintah memberikan subsidi bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta baik yang dikelola oleh masyarakat pribumi, maupun lembaga-lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh komunitas agama para imigran.³⁷ Hal ini sebagai upaya dari pemerintah Belanda dalam mewujudkan dukungan atas sosial etnis, ras, budaya, bahasa, paham keagamaan dan bahkan keyakinan dalam beragama, kebijakan ini sejalan dengan perjuangan dalam menyatarkan masyarakat yang berasal dari kaum imigran dengan masyarakat nasionalis (pribumi) Belanda yang dalam perspektif sejarah berlangsung sejak tahun 1970-an sampai dengan 1980-an.³⁸ Bahkan terkadang masyarakat yang berasal dari kaum imigran diposisikan sebagai bagian dari kelompok kultural yang monolitik, dengan dasar pentingnya kesadaran kebangsaan yang demokratis dan harmunis.³⁹ Isu kultural monolitik ini pada tahun 1990-an menjadikan agama kaum imigran yang menjadi landasannya. Komunitas kaum imigran ini melakukan komunikasi dengan bahasa pemerintah Belanda dengan beranggapan bahwa hal tersebut adalah bahasa mereka pula, bagi kaum imigran yang dari Maroko dengan tetap menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya, meskipun tidak semua diantara mereka mengerti bahasa tersebut.⁴⁰

Seiring berjalannya waktu, secara historis konsensus terhadap multikulturalisme mulai di pertentangkan, dan sejak itu pula kebencian dan diskriminatif terhadap para imigran makin meluas, bahkan makna atau pengertian tentang eknik dalam kebangsaan

³³ Linthorst, "The Role of Race and Culture within Marginalized Teachers' Teaching in The Netherlands."

³⁴ Scholten, "The Dutch Multicultural Myth."

³⁵ Marlou Schrover, "Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas," *BMGN - Low Countries Historical Review* 125 (1 Januari 2010), <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7124>.

³⁶ Airiian, *The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands*.

³⁷ "Multiculturalism and Ethnic Identity in Britain and Europe."

³⁸ Karel Leyva, "Multiculturalisme et Laïcité En France : Les Trois Republicanismes Du Rapport Stasi," *Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue Canadienne de Philosophie* 54, no. 4 (Desember 2015): 647–84, <https://doi.org/10.1017/S0012217316000020>.

³⁹ "The Bijlmer: A Dutch Approach to Multiculturalism," *Humanity in Action* (blog), diakses 8 Juli 2022, https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/the-bijlmer-a-dutch-approach-to-multiculturalism/.

⁴⁰ "Multiculturalisme et Laïcité En France."

Belanda kian diperdebatkan.⁴¹ Dukungan pada tegaknya identitas nasional dan isu nasionalisme Belanda semakin hari tak pernah hilang. Maka atas dasar fenomena ini, perspektif sejarah bahwa sejak 1990-an negara Belanda mengalami pergeseran dari konsensus politik multikulturalis menjadi asimilasi budaya dalam berpolitik. Bahkan sebagian peneliti mengungkapkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan termasyhur dengan kebijakan yang sangat keras di bandingkan dengan berbagai negara di eropa.⁴²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di negara Belanda konsensus multikulturalisme mengalami penolakan dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pihak oposisi pemerintah dengan berbagai isu yang dikembangkan sebagai alasannya. Namun meskipun demikian pemerintah tetap mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai sebuah konsensus dalam mengatur jalannya roda pemerintahan, hal tersebut dilakukan guna kemajuan dan perkembangan ekonomi bangsa ini.⁴³ Bahkan pemerintah Belanda menyadari betul bahwa keseluruhan kebudayaan penting untuk dilestarikan dan penting untuk mendapatkan kebebasan untuk mengaturnya. Pemerintah Belanda berdalih bahwa adanya budaya dan tradisi pluralisme-multikultural merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang sejak lama berkembang di negara Belanda ini.

Sejarah Pendidikan Multikultural di Belanda

Perspektif sejarah Belanda telah dikenal secara internasional karena pendekatan pendidikannya menekankan prinsip multicultural dalam rangka merangkul dan menyikapi kelompok imigran. Beberapa bahkan berbicara tentang model pendidikan multikultural yang secara terus-menerus diinformasikan implementasi kebijakan politik dan praktik kebijakan Belanda sampai hari ini.⁴⁴ Dasar Premis model ini adalah bahwa kebijakan Belanda telah didorong oleh keyakinan yang koheren dan konsisten bahwa pengakuan dan akomodasi kelompok budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat akan mengarah pada keberhasilan emansipasi mereka ke dalam masyarakat multikultural Belanda.⁴⁵ Hal tersebut telah terbukti bahwa masyarakat yang multikultural, yang berbeda secara etnis, ras, budaya dan bahkan berbeda keyakinan dalam beragama bisa hidup berdampingan secara damai dan harmunis serta rukun tanpa pernah terjadi konflik.

Model pendidikan multikultural Belanda dalam sejarahnya konon sangat dipengaruhi oleh peran para akademisi dan pakar pendidikan di Belanda. Di antara para peneliti yang terlibat dalam bidang ini, akan ada kepercayaan yang kuat pada apa yang disebut model multikultural. Karel Leyva mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan multikultural berpacu pada paradigma etnis minoritas Belanda. Lebih jauh lagi, para

⁴¹ "The Bijlmer."

⁴² Leyva, "Multiculturalisme et Laïcité En France."

⁴³ Scholten, "The Dutch Multicultural Myth."

⁴⁴ Hasan Aydin, "Multicultural Education Curriculum Development in Turkey," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 3 (1 September 2012): 277–86, <https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n3p277>.

⁴⁵ Aslan*, "How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey?"

peneliti di bidang ini akan sangat berorientasi pada kebijakan dan bahkan terjalin dalam jaringan kebijakan.⁴⁶ Marlou Schrover menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan multikultural ini harus sejalan dengan simbiosis teknokratis yang memungkinkan pengembangan di balik pintu berlapis emas pendekatan kebijakan multikultural, sementara mengabaikan beberapa paradigma kebijakan alternatif.⁴⁷

Namun, ada keraguan yang berkembang tentang apakah model multikultural telah atau setidaknya terus menjadi penggambaran yang valid dari pendekatan Belanda terhadap integrasi imigran?⁴⁸ Model multicultural tampaknya telah diciptakan secara retrospektif, dalam upaya para politisi untuk mendiskualifikasi kebijakan yang tidak mereka setujui. Para politisi ini dibantu dalam upaya pembingkaiannya oleh beberapa ilmuwan sosial yang mengklaim bahwa ada bukti bahwa, ketika menyangkut praktik kebijakan konkret, beberapa tindakan mencerminkan model multikultural Belanda.⁴⁹ Namun, ketika menyangkut praktik kebijakan di tingkat lokal, diperdebatkan apakah praktik kebijakan ini benar-benar didorong oleh model multikultural normatif atau oleh kekhawatiran yang lebih pragmatis tentang menjaga hal-hal bersama-sama.⁵⁰

Kebijakan multikultural diambil karena wujud dari keragaman budaya di Belanda telah menjadi topik penting dalam politik dan media, terutama pertanyaan tentang bagaimana menghadapinya. Istilah pendidikan multikultural di Belanda memiliki dua arti dalam perdebatan ini: makna demografis, yang mengacu pada populasi yang heterogen secara budaya, dan ideologi, yang mensyaratkan bahwa perbedaan budaya harus diterima dan dihargai oleh semua kelompok dalam masyarakat.⁵¹ Salah satu indikator munculnya kebijakan implementasi pendidikan multikultural di Belanda adalah jumlah populasi imigran (terdiri dari mereka yang lahir di luar negeri atau mereka yang memiliki setidaknya satu orang tua yang lahir di luar negeri) secara keseluruhan merupakan sekitar 18% dari total populasi Belanda, hanya yang disebut imjy, igran non-Barat yang menyebabkan pemerintah Belanda khawatir. tentang kegagalan integrasi.⁵²

Kebijakan pendidikan multikultural di Belanda dalam sejarahnya bermula dari gagasan pilarisasi secara historis populer di Belanda mengacu secara umum pada kerja sama elit di antara komunitas agama dan ideologis ini mulai kehilangan dukungan pada 1960-an. Meskipun tidak secara eksplisit digantikan oleh wacana multikulturalisme, Kebijakan Minoritas, yang disahkan pada tahun 1979, memungkinkan pengaturan

⁴⁶ Leyva, "Multiculturalisme et Laïcité En France."

⁴⁷ Schrover, "Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas."

⁴⁸ Airiiian, *The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands*.

⁴⁹ Barb, "The New Politics of Religious Education in the United States and Germany."

⁵⁰ "The Bijlmer."

⁵¹ Karatekin, Akcaoğlu, dan Taban, "A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students."

⁵² Fadime Koc-Damgaci dan Hasan Aydin, "Social Media and Its Potential Impacts on Multicultural Education in Turkey," *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 14, no. 3 (2 Desember 2017): 797–810, <https://doi.org/10.12973/ejmste/80945>.

kelembagaan paralel dan dapat dianggap sebagai multikulturalis.⁵³ Namun, kebijakan tersebut mulai menurun, dengan fokus bergeser pada pertengahan 1990-an ke integrasi dan asimilasi. Setelah pemilu 1994, Demokrat Kristen mengganti Kebijakan Minoritas Belanda dengan Kebijakan Integrasi. Ini menggeser kebijakan Belanda dari pengakuan dan pemeliharaan keanekaragaman budaya. Kebijakan Integrasi sangat terfokus pada penggabungan sosio-ekonomi para imigran.⁵⁴ Namun, pengenalan Kebijakan Integrasi pada saat itu bukan merupakan penolakan terhadap multikulturalisme itu sendiri, melainkan reaksi terhadap pengangguran, hasil pendidikan yang buruk, dan ketidakberuntungan sosial di antara para imigran. Kebijakan Minoritas sebelumnya dikritik karena tidak menangani tantangan-tantangan ini secara memadai.⁵⁵

Sejak tahun 1998, dengan disahkannya Undang-Undang tentang Integrasi Kewarganegaraan Bagi Pendatang Baru, imigran telah diminta untuk mengambil kursus integrasi.⁵⁶ Seperti yang dijelaskan dalam *The Bijlmer* bahwa pergeseran ini menandai terobosan kebijakan baru yang berfokus pada pembelajaran bahasa Belanda secara penuh sebagai upaya penanaman nilai patriotisme kebangsaan di Belanda, tidak hanya itu, adanya penekanan kepada mereka untuk mengambil kelas sipil.⁵⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif sejarah pertumbuhan dan perkembangan implementasi kebijakan pendidikan multikultural mengalami perubahan sejak tahun 1990-an, hal itu disebabkan pasca pemilu 1994, Demokrat Kristen menghendaki pergantian kebijakan untuk kaum minoritas Belanda dengan Kebijakan Integrasi. Dalam artian, kebijakan tersebut dibuat sebagai upaya pengelompokan dan adanya upaya penyekatan antara kaum imigran dengan kaum pribumi atau penduduk asli negara Belanda. Dalam aspek pendidikan kaum imigran ditekankan untuk juga mempelajari bahasa Belanda dan digabungkan dengan kelas sipil.

Perbandingan Pendidikan Multikultural di Turki dan Belanda

Perbandingan antara pendidikan multikultural di Turki dan Belanda perspektif sejarah berdasarkan hasil penelusuran dan pembahasan di atas, dapat dijabarkan bahwa secara resmi Turki telah menjadi negara sekuler sejak tahun 1937. Di negara berpenduduk mayoritas Muslim ini dengan sedikit pemeluk agama lain, pendidikan institusional pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya sangat terpusat.⁵⁸ Pendekatan ini dimulai dengan *Tevhid-I Tedrisat* (UU Kesatuan Pendidikan), pertama kali dirancang pada tahun 1924 dan dipertahankan dalam reformasi hukum dan perubahan konstitusi berikutnya.

⁵³ Leyva, "Multiculturalisme et Laïcité En France."

⁵⁴ Özsoy dan Bilgi, "Multicultural Education Perspective in Turkey."

⁵⁵ Wim J. Deetman, "1. Education Policy and Minorities: A Dutch View," dalam *1. Education Policy and Minorities: A Dutch View* (De Gruyter Mouton, 2019), 3–8, <https://doi.org/10.1515/9783111546834-005>.

⁵⁶ "The Bijlmer."

⁵⁷ Deetman, "1. Education Policy and Minorities."

⁵⁸ Paksoy dan Añeläk, "Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education."

Berdasarkan undang-undang ini, semua lembaga pendidikan, termasuk sekolah militer dan kedokteran, berada di bawah kendali Departemen Pendidikan. Selain itu semua medreses (sekolah agama tradisional), dihapuskan dan sekolah ketuhanan didirikan untuk mendidik para sarjana dalam mata pelajaran agama.⁵⁹

Selain itu, Durukan Kuzu mengemukakan bahwa terdapat beberapa sekolah menengah dibuka untuk melatih personel layanan keagamaan di masyarakat. Tempat pendidikan agama sering dibicarakan dengan memperhatikan hubungan antara negara dan agama. Sampai saat ini, agenda diskusi tentang pendidikan agama terfokus pada implementasi mata pelajaran seperti itu di sekolah negeri.⁶⁰ Namun, kualitas dan isi pendidikan agama kurang mendapat perhatian. Menyusul pengakuan pentingnya pengetahuan ilmiah untuk pendidikan dan penerimaan pendidikan agama sebagai disiplin akademis, pengenalan kurikulum wajib adalah pendidikan Agama dan Pengetahuan Etika telah memicu akademisi untuk membahas di berbagai media dan isi pendidikan agama di sekolah-sekolah Turki menghormati konteks negara sekuler yang demokratis. Upaya menuju keanggotaan komunitas Eropa telah mempercepat proses ini.⁶¹

Adapun yang melatar belakangi sejarah dan kedudukan pendidikan di Turki, sejatinya adalah sebagai penerus Kekaisaran Ottoman, negara bangsa Republik Turki muncul pada tahun 1923. Revolusi Turki lebih dari sekadar peristiwa politik, karena itu juga merupakan revolusi sosial, budaya dan ekonomi. Sehubungan dengan pendidikan agama, banyak fluktuasi dalam pendidikan agama di sekolah dapat diamati di Turki modern. Selama seperempat abad pada awal era republik, sistem pendidikan Turki bekerja dengan basis sekuler yang ketat. Semua tingkat pendidikan agama hampir secara resmi dilarang selama sekitar dua dekade. Setelah Perang Dunia Kedua, hubungan sosial-ekonomi dengan demokrasi Barat membaik dan inisiasi sistem multi-partai mempengaruhi struktur pendidikan.⁶² Dalam konteks ini, pendidikan agama di sekolah muncul sebagai isu penting. Setelah perdebatan panjang di tingkat politik, pendidikan agama di sekolah negeri diperkenalkan tidak hanya di sekolah dasar (tahun 1949), tetapi juga di sekolah menengah pertama (tahun 1956), serta di sekolah menengah atas (tahun 1967). Namun, atas dasar sukarela. Pendidikan agama opsional di sekolah berlanjut hingga tahun 1982. Pendidikan etika wajib diperkenalkan di sekolah menengah pada tahun 1974.⁶³

Setelah pengambilalihan militer tahun 1980, pendidikan agama menjadi bagian wajib dari kurikulum sekolah, dan dimasukkan dalam Konstitusi Turki 1982 dalam pasal

⁵⁹ Barb, "The New Politics of Religious Education in the United States and Germany."

⁶⁰ Durukan Kuzu, *Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State* (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781108278461>.

⁶¹ Muhammet Genç, K.H. (Ina) Avest, dan Siebren Miedema, "Religious Education in Two Secular Multicultural Societies: A Comparison of the Turkish and Dutch Systems: Religious Education from Christian and Islamic Perspectives," 2012, 183–91, https://doi.org/10.1163/9789401207584_014.

⁶² Karatekin, Akcaoglu, dan Taban, "A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students."

⁶³ Eshabil dan Sabri, "Readiness of Turkish Education system for Multicultural education."

24. Di sekolah umum, kursus berbasis agama bernama budaya dan etika Agama harus disediakan. Mata pelajaran ini wajib, sebagaimana disebutkan dalam konstitusi. Pasal 24 UUD menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran tentang agama dan etika diselenggarakan di bawah pengawasan badan-badan public kenegaraan. Mata pelajaran terkait merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang disampaikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kegiatan pendidikan dan pengajaran terkait lainnya disediakan hanya atas permintaan orang, dan untuk orang muda, dari wali yang sah.⁶⁴

Adapun pendekatan yang di implementasikan dalam pendidikan agama di Turki, mata pelajaran budaya dan etika Agama saat ini tidak hanya membahas Islam. Namun juga memberikan pengetahuan agama umum tanpa orientasi preferensial terhadap agama tertentu (pendekatan non-konfesional). Genç, Avest, dan Miedema mengemukakan bahwa alasan mata pelajaran wajib dengan judul budaya dan etika keagamaan mulai tahun 1982 ini merupakan indikasi netral terhadap semua cabang agama dan dengan demikian, juga memberikan informasi umum tentang mata pelajaran budaya dan etika agama Islam di Turki, sebagai hasil dari pengalaman pendidikan dan pengajaran agama, mengadopsi mata pelajaran wajib ini.⁶⁵ Mata pelajaran ini tidak boleh mengarah pada pemisahan, tetapi sebaliknya pada persatuan dan kesatuan sosial dalam hal mendukung dan menangani dengan benar. dengan pandangan dunia yang berbeda sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa.⁶⁶ Oleh karena itu, perlu adanya model pendidikan agama yang terintegrasi, dan Turki telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan memperkenalkan wajib tersebut di atas.

Sedangkan di Belanda, seperti halnya Turki, juga menganut konsep negara sekuler dan demokratis. Sistem pendidikan Belanda masih bercirikan desentralisasi, yang disebut sistem pendidikan terpillarisasi berdasarkan garis pemisah agama. Sekolah negeri di bawah tanggung jawab pemerintah daerah atau perwakilan orang tua hanya menyumbang 31% dari total jumlah sekolah.⁶⁷ Mayoritas terdiri dari sekolah-sekolah swasta yaitu sekolah-sekolah denominasi termasuk antara lain sekolah-sekolah Protestan, Injili, Reformed, Katolik Roma, Islam, Hindu, dan Yahudi yang memberikan pendidikan dari latar belakang agama atau pandangan dunia tertentu (61%), dan sekolah-sekolah berdasarkan konsepsi pedagogis tertentu yang berasal dari Montessori, Freinet, Steiner, Parkhurst atau Petersen (8%). Di sini orang tua adalah pemangku kepentingan langsung atau tidak langsung dari sekolah. Sekolah negeri dan sekolah denominasi sama-sama dibiayai oleh pemerintah

⁶⁴ Kuzu, *Multiculturalism in Turkey*.

⁶⁵ Genç, Avest, dan Miedema, "Religious Education in Two Secular Multicultural Societies."

⁶⁶ Neyzi, "Review of Multiculturalism in Turkey."

⁶⁷ Yvonne Leeman dan Guuske Ledoux, "Intercultural Education in Dutch Schools," *Curriculum Inquiry* 33, no. 4 (2003): 385–99.

ketika memenuhi persyaratan standar, dan berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Inspektoratnya.⁶⁸

Agama dalam pendidikan di Belanda mendapat perhatian khusus dengan kedatangan orang-orang Islam yang disebut pekerja tamu (imigran) dan keluarga mereka di Belanda pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan abad yang lalu. Apalagi, ketika ternyata para pekerja dan keluarganya tidak pulang ke tanah air. Itu berdampak pada sekolah negeri dan denominasi. Sejak tahun 2006 topik agama dalam pendidikan menjadi agenda dalam kaitannya dengan mata pelajaran wajib pendidikan kewarganegaraan yang baru diperkenalkan dengan tujuan untuk: pengakuan pandangan dunia yang berbeda, merangsang toleransi dan keterbukaan untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda pandangan, dan belajar untuk hidup. beragama bersama di sekolah dan masyarakat.⁶⁹

Sedangkan yang melatar belakangi sejarah dan kedudukan pendidikan di Belanda bermula sejak abad ke-19 dengan dimulainya Belanda sebagai Negara bangsa, di tingkat negara tidak ada hubungan kelembagaan dalam pendidikan dengan gereja. Namun, pendidikan agama diberikan di semua sekolah negeri dan berdasarkan teologi Protestan tertentu. Pada awal abad ke -19 , sebagai spin-off dari pendudukan Prancis, Belanda telah kurang lebih sistem yang sama seperti Perancis sampai tahun 1882. Kurikulum berorientasi pada semua kebajikan agama dan masyarakat dengan penekanan kuat pada pendidikan moral.⁷⁰ Dengan konstitusi Belanda tahun 1848, sistem pendidikan ganda yang masih ada diperkenalkan dengan pembedaan antara sekolah negeri yang netral secara agama dan denominasi yaitu sekolah swasta berbasis agama.⁷¹ Sekolah-sekolah ini sejak tahun 1917 telah didanai secara merata oleh negara. Sampai tahun 1985, negara tidak mengambil tanggung jawab eksplisit apapun untuk agama dalam pendidikan. Setelah tahun 1985, pelajaran pendidikan agama objektif yang dicirikan sebagai gerakan Agama dan ideologi telah menjadi wajib bagi semua sekolah dasar negeri dan denominasi dan bagi murid-murid dalam kelompok usia 10-12, selama dua tahun terakhir sekolah dasar. Sekolah-sekolah denominasi masih dapat menyediakan di samping ini pendidikan agama berorientasi subyektif khusus mereka untuk murid-murid berusia 4-12 tahun. Hak ini didasarkan pada kebebasan pendidikan yang dirumuskan dalam pasal 23 UUD.⁷²

Sedangkan pendekatan yang di implementasikan dalam pendidikan agama di Belanda adalah seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, pendekatan non-pengakuan dalam pendidikan agama juga merupakan bagian dari kurikulum sekolah dasar

⁶⁸ Genç, Avest, dan Miedema, "Religious Education in Two Secular Multicultural Societies."

⁶⁹ J. W. Duyvendak dan P. W. A. Scholten, "Beyond the Dutch 'Multicultural Model,'" *Journal of International Migration and Integration* 12, no. 3 (1 Agustus 2011): 331–48, <https://doi.org/10.1007/s12134-010-0161-5>.

⁷⁰ Kaya, "The Netherlands."

⁷¹ Schrover, "Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas."

⁷² Duyvendak dan Scholten, "Beyond the Dutch 'Multicultural Model.'"

di Belanda sejak 1985. Mata pelajaran gerakan Agama dan ideologi adalah mata pelajaran reguler di sekolah. Tujuannya adalah mengenalkan siswa secara objektif yaitu dengan cara berbasis pengetahuan dengan agama-agama utama dunia atau pandangan dunia dalam masyarakat multikultural dan multi-agama Belanda, mendiskusikan proposisi agama, dan membantu siswa untuk mendapatkan wawasan tentang berbagai keyakinan pandangan dunia dengan nilai-nilai khusus mereka. dan nilai norma.⁷³

Di samping pendidikan agama atau pandangan dunia wajib dalam bentuk ini untuk sekolah negeri dan denominasi, orang tua sekolah negeri mungkin juga ingin memiliki pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, atau pembentukan pandangan dunia humanistik untuk anak-anak mereka atas dasar fakultatif yang disediakan oleh apa yang disebut organisasi pengirim di sekolah tetapi tidak berada di bawah tanggung jawab guru sekolah. Sekolah-sekolah denominasi bebas untuk memberikan pendidikan agama yang mereka inginkan untuk murid-murid mereka yang mengaku atau dalam bentuk terbuka sehingga pengajaran tentang dikombinasikan dengan pengajaran dari agama atau pandangan.⁷⁴ Di Turki, bagaimanapun, orang tua tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pengakuan terhadap kelompok yang menolak toleransi di sekolah negeri dan di sekolah swasta terbuka. Ini benar-benar perbedaan mencolok antara Turki dan Belanda.

⁷³ Leeman dan Ledoux, "Intercultural Education in Dutch Schools."

⁷⁴ Scholten, "The Dutch Multicultural Myth."

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif sejarah dua negara (Turki dan Belanda) sama-sama telah menuangkan ideologi multikulturalisme dalam setiap mengeluarkan kebijakan dalam aspek kenegaraan, terutama dalam aspek kebijakan pendidikan. Dua Negara ini secara konsisten telah mengamanatkan melalui undang-undang tentang pengaolikasian ideologi multikulturalisme dan penerapan pembelajaran pendidikan multikultural di setiap lembaga pendidikan di Negara turki dan Belanda mulai tingkat dasar hingga lembaga pendidikan tingkat tinggi. Dalam dinamikanya dua negara ini secara terus-menerus kedatangan para imigran yang secara hukum harus dilindungi dan daitur dalam rangka mewujudkan kebijakan multikulturalisme.

Perbandingan dan Perkembangan pendidikan multikultural di Turki dan Belanda dapat dilihat dari aspek nilai agama dalam pendidikan, kita dapat menunjukkan perbedaan yang luar biasa, hal ini sebagaimana berikut: 1) melihat keterbatasan di Turki, kebebasan orang tua dalam memilih di Belanda luar biasa dalam menentukan sekolah negeri maupun sekolah denominasi masing-masing dalam bentuk pengajaran tentang pandangan dunia dan pendidikan agama fakultatif atau dalam bentuk sekolah berbasis agama dengan bentuk pendidikan agama obyektif dan subyektif; 2) peran penting dan sangat sentral dari pemerintah Turki nampak jelas dalam mengkonsep, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang memuat nilai multikulturalisme dan buku-buku teks, dibandingkan dengan kebijakan multikulturalisme yang ada di Belanda terlihat marjinal dan hanya melakukan penyesuaian dan pemeriksaan bahan ajar yang memuat ideologi multikulturalisme. Akan sangat menarik untuk mengetahui bagaimana anak-anak dan remaja di kedua negara mengalami kemampuan mereka untuk menghadapi masyarakat multikultural dan multiagama mereka, dan apakah perubahan tertentu dalam sistem ini (dan yang mana?) akan mengoptimalkan kemampuan ini. Ini benar-benar menjadi masalah yang menarik untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- “(2) Multicultural Education Curriculum Development in Turkey | Hasan Aydin - Academia.edu.” Diakses 2 Juli 2022. https://www.academia.edu/22480593/Multicultural_Education_Curriculum_Development_in_Turkey.
- Airiian, Elina. *The Retreat of Multiculturalism in the Netherlands: A Post-Structural Policy Analysis*. Malmö universitet/Kultur och samhälle, 2019. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-22754>.
- Aslan, Gülay. “Teachers and multiculturalism in turkey: An evaluation of the competency perceptions of teachers regarding multiculturalism and their reflection of these perceptions to the classroom.” *Journal for Critical Education Policy Studies* 15 (1 Desember 2017): 361–96.
- Aslan*, Serkan. “How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study.” *How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study* 8, no. 1 (2 Mei 2019): 233–47.
- Aslan*, Serkan, dan Bırsel Aybek. “Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill.” *Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill* 6, no. 1 (18 Februari 2020): 43–55.
- Aydin, Hasan. “Multicultural Education Curriculum Development in Turkey.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 3 (1 September 2012): 277–86. <https://doi.org/10.5901/mjss.2012.v3n3p277>.
- Barb, Amandine. “The New Politics of Religious Education in the United States and Germany.” *German Law Journal* 20, no. 7 (Oktober 2019): 1035–46. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.73>.
- Deetman, Wim J. “1. Education Policy and Minorities: A Dutch View.” Dalam *1. Education Policy and Minorities: A Dutch View*, 3–8. De Gruyter Mouton, 2019. <https://doi.org/10.1515/9783111546834-005>.
- Deuze, Mark. “Multicultural Journalism Education in the Netherlands: A Case Study.” *Journalism & Mass Communication Educator* 60 (1 Desember 2005). <https://doi.org/10.1177/107769580506000407>.
- Duyvendak, J. W., dan P. W. A. Scholten. “Beyond the Dutch ‘Multicultural Model.’” *Journal of International Migration and Integration* 12, no. 3 (1 Agustus 2011): 331–48. <https://doi.org/10.1007/s12134-010-0161-5>.
- Eshabil, Erdem, dan ÇELİK Sabri. “Readiness of Turkish Education system for Multicultural education.” *Educational Research and Reviews* 14 (23 April 2019): 274–81. <https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171>.
- Genç, Muhammet, K.H. (Ina) Avest, dan Siebren Miedema. “Religious Education in Two Secular Multicultural Societies: A Comparison of the Turkish and Dutch Systems: Religious Education from Christian and Islamic Perspectives,” 183–91, 2012. https://doi.org/10.1163/9789401207584_014.
- Hall, John A. “Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship, and: Multinational Democracies (review).” *The Canadian Journal of Sociology* 29, no. 3 (2004): 482–83. <https://doi.org/10.1353/cjs.2004.0041>.
- Ibrahim, Rustam. “PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam.” *ADDIN* 7, no. 1 (14 November 2015). <https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.573>.
- Idris, Muh. “AZYUMARDI AZRA’S THOUGHT ON MULTICULTURAL EDUCATION.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 1 (26 Oktober 2020): 52–70. <https://doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739>.
- Karacsony, Peter, Vivien Pásztoóvá, Mikhail Vinichenko, dan Peter Huszka. “The Impact of the Multicultural Education on Students’ Attitudes in Business Higher Education

- Institutions.” *Education Sciences* 12, no. 3 (Maret 2022): 173. <https://doi.org/10.3390/educsci12030173>.
- Karatekin, Kadir, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, dan Muhammet Hayati Taban. “A Comparative Study on Multicultural Attitude of University Students: Austria, Hungary and Turkey Sample.” *Journal of History Culture and Art Research* 8, no. 4 (22 Desember 2019): 36–55. <https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2238>.
- Kaya, Ayhan. “The Netherlands: From Multiculturalism to Assimilation.” Dalam *Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization*, disunting oleh Ayhan Kaya, 116–40. Migration, Diasporas and Citizenship. London: Palgrave Macmillan UK, 2009. https://doi.org/10.1057/9780230234567_5.
- Koc-Damgaci, Fadime, dan Hasan Aydin. “Social Media and Its Potential Impacts on Multicultural Education in Turkey.” *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 14, no. 3 (2 Desember 2017): 797–810. <https://doi.org/10.12973/ejmste/80945>.
- “Konsep pendidikan multi kultural dalam kerangka pendidikan islam.” Diakses 8 Juni 2022. <https://123dok.com/document/7q0em0xy-konsep-pendidikan-multi-kultural-dalam-kerangka-pendidikan-islam.html>.
- Kuzu, Durukan. *Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State*. Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781108278461>.
- Lasijan, Lasijan. “MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 2 (2014): 125–39. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i2.1610>.
- Leeman, Yvonne, dan Guuske Ledoux. “Intercultural Education in Dutch Schools.” *Curriculum Inquiry* 33, no. 4 (2003): 385–99.
- Leyva, Karel. “Multiculturalisme et Laïcité En France : Les Trois Républicanismes Du Rapport Stasi.” *Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue Canadienne de Philosophie* 54, no. 4 (Desember 2015): 647–84. <https://doi.org/10.1017/S0012217316000020>.
- Linthorst, F. M. B. L. “The Role of Race and Culture within Marginalized Teachers’ Teaching in The Netherlands,” 2020. <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/38622>.
- Universitas Indonesia Library. “Multiculturalism and Ethnic Identity in Britain and Europe.” *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* Vol. 3 No. 3 2007: 52–67, 2007. <https://lib.ui.ac.id>.
- “Multiculturalism in Turkey.” Diakses 2 Juli 2022. <https://www.cambridge.org/core/books/multiculturalism-in-turkey/6EA9042377160BA61BA7E0ED165259F8>.
- “Multikulturalisme Indonesia dan Eropa | Republika Online.” Diakses 7 Juni 2022. <https://www.republika.co.id/berita/n44s11/multikulturalisme-indonesia-dan-eropa>.
- Neyzi, Leyla. Review of *Review of Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State*, oleh Durukan Kuzu. *Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association* 7, no. 2 (2020): 273–75.
- Özsoy, Seçkin, dan Sabiha Bilgi. “Multicultural Education Perspective in Turkey: Possibilities and Dilemmas.” Dalam *Learning from Difference: Comparative Accounts of Multicultural Education*, disunting oleh Joseph Lo Bianco dan Aydin Bal, 147–69. Multilingual Education. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26880-4_8.
- Paksoy, Eshabil Erdem, dan Sabri Aşelâk. “Readiness of Turkish Education System for Multicultural Education.” *Educational Research and Reviews* 14, no. 8 (23 April 2019): 274–81. <https://doi.org/10.5897/ERR2017.3171>.
- Sayyi, Ach Sayyi Ach, Moh Subhan, Shahibul Muttaqien Al-Manduriy, dan Rofiqi. “Management Model of Kitab Kuning Reading Acceleration Program at Mambaul Ulum Islamic Boarding School, Bira Timur Sampang.” *FIKROTUNA* 13, no. 01 (8 Oktober 2021). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/4788>.

- Scholten, Peter. "The Dutch Multicultural Myth." Dalam *Challenging Multiculturalism*, disunting oleh Raymond Taras, 97–119. European Models of Diversity. Edinburgh University Press, 2013. <https://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt20q22fw.11>.
- Schrover, Marlou. "Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing, Dutch Migration History and the Enforcement of Essentialist Ideas." *BMGN - Low Countries Historical Review* 125 (1 Januari 2010). <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7124>.
- "Sejarah Perkembangan Multikultural di AS dan Eropa." Diakses 7 Juni 2022. <https://text-id.123dok.com/document/dzx3pr3nz-sejarah-perkembangan-multikultural-di-as-dan-eropa.html>.
- Humanity in Action. "The Bijlmer: A Dutch Approach to Multiculturalism." Diakses 8 Juli 2022. https://www.humanityinaction.org/knowledge_detail/the-bijlmer-a-dutch-approach-to-multiculturalism/.
- Zainullah, Zainullah, dan Ach Sayyi. "Dinamika Pendidikan Islam Multikultural Perspektif Tradisi Dan Perkembangan Pesantren Di Indonesia." *FIKROTUNA* 9, no. 1 (13 Agustus 2019): 1137–59. <https://doi.org/10.32806/jf.v9i2.3489>.